



PENGENTASAN KEMISKINAN

Agenda yang Tidak Pernah Selesai

Editor :
Shadu Satwika Wijaya
Guntur Gunarto
Lilis Sri Sulistiani

***Pengentasan Kemiskinan:
Agenda yang Tidak
Pernah Selesai***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk. Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Muslih Faozanudin, Andi Zaelani, Darmanto Sahat Styawan,
Sukarso, Niken Paramarti Dasuki, Bambang Tri Harsanto,
Simin, Darmanto Sahat Satyawan, Sendy Noviko, Tobirin, Diah
Setyorini Gunawan, Rifda Naufalin, Denok Kurniasih, Pau-
lus Israwan Setyoko, Hikmah Nuraini, Wahyuningrat, Slamet
Rosyadi, Alizar Isna, Muhammad Yamin, Agus Ganjar Runtiko,
Dyah Wahyu Nastiti, Vellayati Hajad, Ikhsan, Zaula Rizky Atika,
Ranjani

***Pengentasan Kemiskinan:
Agenda yang Tidak
Pernah Selesai***



Pengentasan Kemiskinan: Agenda yang Tidak Pernah Selesai

Edisi Pertama
Copyright©2023
Cetakan Pertama: November, 2023

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Halaman: xiv + 306

wi.2023.0334

Penulis:

Muslih Faozanudin, Andi Zaelani, Darmanto Sahat Styawan, Sukarso, Niken Paramarti Dasuki, Bambang Tri Harsanto, Simin, Darmanto Sahat Satyawan, Sedy Noviko, Tobirin, Diah Setyorini Gunawan, Rifda Naufalin, Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, Hikmah Nuraini, Wahyuningrat, Slamet Rosyadi, Alizar Isna, Muhammad Yamin, Agus Ganjar Runtiko, Dyah Wahyu Nastiti, Vellayati Hajad, Ikhsan, Zaula Rizky Atika, Ranjani

Editor : 1. *Shadu Satwika Wijaya*
2. *Guntur Gunarto*
3. *Lilis Sri Sulistiani*

Cover : *Maulana Arifin*
Tata letak : *Dita Yuni Setiawati*

Penerbit
Wawasan Ilmu

Anggota IKAPI (215/JTE/2021)
Leler RT 002 RW 006 Desa Kaliwedi Kec. Kebasen Kab. Banyumas Jawa Tengah
53172

Email : naskah.wawasanilmu@gmail.com

Web : <https://wawasanilmu.co.id/>

ISBN : 978-623-132-155-8

All Right Reserved

Hak Cipta pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR EDITORIAL

Bookchapter dengan judul “Pengentasan Kemiskinan: Agenda yang Tidak Pernah Selesai” ini akan membahas mengapa permasalahan ini belum terselesaikan, meski telah banyak usaha yang dilakukan. Buku ini mengkaji berbagai faktor yang membuat kemiskinan masih sulit dihapus dan apa yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi masalah ini. Buku ini, membahas hambatan yang muncul, mencari tahu apa yang telah berhasil dan belajar dari pengalaman masa lalu tentang upaya pengentasan kemiskinan. Semua ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai permasalahan kemiskinan. Buku ini ditujukan kepada pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, serta pemerhati masalah sosial. "Pengentasan Kemiskinan: Agenda yang Belum Tuntas" ini adalah pengingat akan tanggung jawab bersama kita untuk menghadapi masalah yang mendesak ini dan mendorong semua pihak untuk memperbaiki dunia agar lebih adil dan merata. Buku ini membahas konseptualisasi kemiskinan dan menyajikan berbagai kasus upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan di berbagai belahan dunia. Ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana konsep kemiskinan telah berkembang dan menginspirasi tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini. Buku ini adalah hasil kolaborasi kontributor yang berkomitmen pada perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Terimakasih telah bergabung dalam perjalanan penting ini.

Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Ini adalah keadaan di mana kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal, tidak dapat dipenuhi secara memadai. World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi ketika seseorang tidak memiliki akses terhadap peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sedangkan menurut United Nations Development Programme (UNDP) kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan kurangnya pendapatan. Tetapi mencakup ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dan peluang, serta kekurangan dalam keamanan dan hak-hak dasar. Definisi berbeda dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO) bahwa kemiskinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi peluang dan keuntungan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Perbedaan definisi kemiskinan bergantung pada konteks geografis, budaya, dan pandangan organisasi atau lembaga yang memberikan definisi.

Berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan pada tahun 2023 yaitu 9,36 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka pada tahun 2022 yaitu 9,57 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa penurunan angka kemiskinan hanya 0,21. angka kemiskinan di Indonesia bersifat spesifik wilayah, dengan garis kemiskinan yang spesifik untuk setiap wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh provinsi. Angka kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Indonesia menunjukkan disparitas yang cukup tinggi. Angka kemiskinan di perkotaan menunjukkan angka 7,29 persen dengan jumlah penduduk 11,74 juta orang, sedangkan di perdesaan mencapai 12,22 persen yang mencakup jumlah penduduk 14,16 juta orang. Tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar wilayah, ketimpangan pendapatan, dan determinan sosial. Angka kemiskinan di Indonesia bersifat spesifik wilayah, dengan

garis kemiskinan yang spesifik untuk setiap wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh provinsi. Hal ini didukung oleh , yang melaporkan bahwa sekitar separuh penduduk Indonesia hidup di bawah Rp15.000 per hari, yaitu sekitar PPP USD 2,25 per hari, yang menunjukkan sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan. Selain itu, digarisbawahi bahwa peringkat kemiskinan di Indonesia didasarkan pada garis kemiskinan nasional, di mana individu yang berpenghasilan kurang dari Rp440.538 (USD 30,2) per bulan dianggap hidup dalam kemiskinan (Kadir et al., 2021). Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi 2 macam: (1) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan (2) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin. Secara konseptual menurut standar penilaiannya, kemiskinan dibagi menjadi kemiskinan relatif dan absolut: (1) Ukuran kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif; (2) Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dikaji dari berbagai sudut pandang. Diantaranya pertumbuhan ekonomi dan belanja publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk

mengentaskan kemiskinan. Hasil dari upaya pengentasan tersebut menunjukkan hasil yang beragam, dan bergantung pada kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan karakteristik kemiskinan. Buku bunga rampai ini bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya referensi tentang kemiskinan bagi akademisi dan praktisi pemerhati masalah kemiskinan. Sedangkan isi buku terdiri dari berbagai artikel yang ditulis oleh akademisi sesuai dengan bidang keahliannya. Pembahasan dalam buku ini meliputi:

- Bab 1 Memahami Kemiskinan: Konsep, Jenis dan Strategi Penanggulangannya
- BAB 2 Faktor Penentu Kemiskinan
- BAB 3 Dekomoditasi Kemiskinan di Indonesia: Satu Refleksi Humanisme
- BAB 4 Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan Melalui Transformasi Ekonomi Petani
- BAB 5 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Suatu Kajian Teoritis)
- BAB 6 Flexibilitas Birokrasi dan Kelembagaan dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Tengah Bagian Selatan
- BAB 7 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Aceh Barat
- BAB 8 Entrepreneurship Sebagai Upaya untuk Mengurangi Kemiskinan
- BAB 9 Pengembangan Desa Wisata Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan
- BAB 10 Peran Inovasi dan Kreativitas Aparatur Desa dalam Pengentasan Kemiskinan
- BAB 11 Digitalisasi UMKM Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas

- BAB 12 Public-Private Partnership dalam Menangani Kemiskinan dan Stunting di Perdesaan
- BAB 13 Dinamika Pengukuran Kemiskinan

Purwokerto, 9 Oktober 2023

Tim Editor

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITORIAL v

DAFTAR ISI xi

BAB 1

MEMAHAMI KEMISKINAN: KONSEP, JENIS DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA 1

BAB 2

FAKTOR PENENTU KEMISKINAN 35

BAB 3

DEKOMODITASI KEMISKINAN DI INDONESIA: SATU REFLEKSI HUMANISME 57

BAB 4

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERDESAAN MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI PETANI 75

BAB 5

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (SUATU KAJIAN TEORITIS) 97

BAB 6

FLEXIBILITAS BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN
DALAM MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM DI
JAWA TENGAH BAGIAN SELATAN 117

BAB 7

PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI
KABUPATEN ACEH BARAT 145

BAB 8

ENTREPRENEURSHIP SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENGURANGI KEMISKINAN..... 167

BAB 9

PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI STRATEGI
PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN..... 193

BAB 10

PERAN INOVASI DAN KREATIVITAS APARATUR DESA
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN..... 209

BAB 11

DIGITALISASI UMKM SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
BANYUMAS..... 243

BAB 12

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DALAM
MENANGANI KEMISKINAN DAN STUNTING DI
PERDESAAN..... 259

BAB 13

DINAMIKA PENGUKURAN KEMISKINAN 285

PROFIL PENULIS.....295

DILINDUNGI UU NO. 28 TAHUN 2014
DILARANG DIGANDAKAN DAN DISEBARLUASKAN

PENGENTASAN KEMISKINAN

Agenda yang Tidak Pernah Selesai



Kemiskinan adalah fenomena sosial yang melibatkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini adalah masalah global yang memengaruhi berbagai negara, termasuk Indonesia. Sinopsis ini akan membahas kemiskinan sebagai isu yang melibatkan berbagai aspek. Di Indonesia, kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan serius. Meskipun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan selama beberapa dekade terakhir, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, mencapai sekitar 9,22% pada tahun 2020. Masalah ini melibatkan berbagai faktor penyebab, termasuk ketidaksetaraan pendapatan, akses terbatas ke pendidikan berkualitas, dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Kemiskinan cenderung lebih merajalela di daerah pedesaan, di mana sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama banyak orang. Pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga, dan masalah lainnya dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi keluarga-keluarga di pedesaan. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial, termasuk Kartu Sembako dan Kartu Prakerja, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan memberikan akses ke perumahan dan layanan kesehatan. Pemerintah juga mendorong investasi di sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Tantangan di masa depan melibatkan memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Penting untuk diingat bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensi yang memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Upaya berkelanjutan dan komprehensif dibutuhkan untuk mencapai perkembangan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dalam rangka mengatasi kemiskinan, peran bersama dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.



PENERBIT WAWASAN ILMU
Anggota IKAPI (215/JTE/2021)

Email : naskah.wawasanilmu@gmail.com
WA : 089 535 969 2310
FB : Penerbit Wawasan Ilmu
IG : @penerbitwawasanilmu
@katalogwawasanilmu
Web : www.wawasanilmu.co.id

